PENGELOLAAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

MARTIN SULEMAN
NIM. D01417082

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

Pengelolaan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Martin Suleman[1], Ramlah Alkatiri[2], Umar Sako Baderan[3]
[123)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Indonesia 96212
Email: martin_suleman@gmail.com

ABSTRACT

The objective of research was to determine how the village owned corporation management in increasing communities' economy at Karyamukti village. The method used qualitative research approach with type of research is descriptive. Based on the result obtained the management of BUMDES in Karyamukti still not good because still not able to accommodating the production of farmers' crops, disobeying established procedures, filling positions not in accordance with educational backgrounds, and monitoring carried out only based on AD / ART. However, in the movement of Karyamukti BUMDes tries to improve it by participating in training independently or in a structured manner from the Village Empowerment Service of Gorontalo Regency.

Keywords: ***BUMDES, Management, Economy***

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil peneltian ini didapatkan bahwa pengelolaan BUMDes Karyamukti masih kurang baik karena belum mampu menampung produksi hasil panen para petani, tidak menaati prosedur yang telah ditetapkan, pengisian jabatan belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan pengawasan yang dilakukan sebatas berpedoman pada AD/ART. Walaupun demikian dalam tahap pergerakan BUMDes karyamukti berupaya untuk memperbaikinya dengan cara mengikuti pelatihan secara mandiri maupun secara terstruktur dari pihak Dinas Pembederdayaan Desa Kabupaten Gorontalo.

Kata Kunci: BUMDES, Pengelolaan, Perekonomian

PENDAHULUAN

Titik berat suatu pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan perdesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan

produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

BUMDES merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDES diatur di dalam pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian terkait dengan pengelolaan BUMDes telah cukup banyak dilakukan, seperti penelitian oleh Satika Rani tahun 2018 dengan mengangkat judul Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati tahun 2018 dengan judul penelitian Peranan Badan Usaha Milik DESA (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.

Desa Karyamukti merupakan desa yang yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik pula dan telah memiliki BUMDES didalamnya, Badan Usaha Milik Desa Karyamukti ini didirikan pada bulan Juli Tahun 2018.Badan usaha ini kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Mootinelo.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di BUMDES Mootinelo Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dalam hal ini direktur BUMDES, didapatkan bahwa BUMDES Mootinelo ini baru berjalan selama kurang lebih 2 tahun, Badan Usaha Milik Desa ini menjalankan beberapa jenis unit usaha untuk menambah kas atau pendapatan desa, serta pemenuhan lapangan kerja, yaitu: 1) Unit Usaha Sektor Bidang Jasa pelayanan Mesin Pemipil jagung, 2) Unit usaha bidang Saprodi (Sarana produksi petanian).

Dari kedua jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDES tersebut masih jauh dari harapan, hal ini berdasarkan observasi terhadap masyarakat di Desa Karyamukti didapatkan bahwa jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat terlebih dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun harapan masyarakat dengan adanya BUMDES ini adalah tersedianya lapangan kerja baru, namun usaha yang dikelola belum mampu menjawab harapan masyarakat tersebut, seperti halnya mesin pemipil jagung yang masih minim jumlahnya, sehingga jumlah pekerja yang dapat diserap oleh jenis usaha tersebut masih sangat terbatas.

Demikian juga dengan kios sarana produksi petanian yang menyediakan obat-obatan untuk pertanian, masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, karena jumlah obat-obatan dan sarana produksi lainnya masih kurang jumlahnya, bahkan ada yang belum mampu disediakan oleh pihak BUMDES.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Arikunto, 2009:23). Adapun dalam mengungkapkan kapasitas peran BUMDES dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo peneliti melakukan observasi, yaitu secara bertahap peneliti berusaha memahami gejala-gejala sosial dengan membedakan, membandingkan, mengkategorikan, dan mengelompokkan obyek studi dengan pengamatan di lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi secara langsung.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data dari beberapa sumber, yang dapat dibagi atas:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
   a. Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
   b. Pengelola BUMDES sebanyak 5 orang
   c. Masyarakat sebanyak 5 orang
2. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tertulis dan digunakan sebagai bahan pendukung penelitian.

Dalam pengumpulan data penelitian, teknik yang digunakan terdiri dari beberapa cara sebagai berikut:

1. Observasi; pengumpulan data melalui observasi dengan melakukan pengamatan. Di dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan catatan tak berstruktur dalam tahap pertama yang terbuka, dalam tahap kedua memberikan perhatian pada sejumlah kategori yang terpilih.
2. Wawancara; pengumpulan data melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka yang diajukan kepda sejumlah informan.
3. Dokumentasi; dokumentasi umumnya digunakan untuk menjaring data-data sekuder berupa berupa catatan-catatan, buku-buku, laporan-laporan serta dokumen lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah data yang terkumpul dapat dipercaya. Untuk memperoleh keabsahan data atau uji coba kredibilitas informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Triangulasi, yaitu mengecek kebenaran data yang diperoleh kepada sumber lain pada waktu berlainan dan dengan metode pendekatan lain.
2. Member cheek, yaitu mengkonfirmasikan kembali data yang sudah ada kepada responden yang pernah diwawancarai.
3. Mengamati dengan cermat, berulang-ulang dan terus-menerus tentang objek yang diobservasi (obyek penelitian).
4. Mendiskusikan data yang sudah ada dengan orang lain yang mengetahui keadaan di lapangan penelitian.
5. Memperpanjang waktu penelitian sehingga lebih banyak kesempatan untuk meninjau kembali hal-hal yang sudah disimpulkan dengan keadaan nyata di lapangan.
6. Mengecek kebenaran dan kecocokan hasil interpretasi dari simpulan yang sudah dirumuskan pada waktu yang lalu pada hasil observasi yang pernah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango dengan mengambil sampel dari Dua Belas informan yaitu diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Lima pengurus BUMDes dan Lima orang pemanfaat usaha BUMDes. Dari survei yang dilakukan terhadap informan ditambah wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber kemudian menghasilkan data yang kemudian dianalisis dan dilakukan pembahasan.

Dalam menganilisis pengeloaan BUMDes Karyamukti dibutuhkan suatu pendekatan teori, untuk itu teori yang digunakan oleh peneliti bersumber dari teori Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengarahan, dan pengawasan. Berdasarkan teori tersebut berikut diuraikan pembahasan yang didasarkan pada hasil penelitian.

1. Perencanaan

Dalam melakukan sebuah perencanaan pada awalnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keahlian pengelola BUMDes itu sendiri dengan tujuan dan sasaran yang ingin di peroleh, sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu organisasi tersebut dengan berbagai program yang telah direncanakan hanya satu program saja yang telah dibentuk. Adapun indikator-indikator perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Tujuan

Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Dalam penetapan tujuan yang ingin di capai oleh BUMDes Karyamukti adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan perekonomian desa. Tujuan dari BUMDes itu sendiri yaitu memberikan kemudahan serta membantu masyarakat Desa Karyamukti , dengan kata lain usaha yang dibentuk dapat memberi keuntungan sosial kepada masyarakat, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar bahkan meningkatkan perekonomian desa.

b. Menetapkan prosedur dalam pelaksanaan program BUMDes

BUMDes Karyamukti sudah Ada prosedur dalam menjalankan setiap unit-unit usahanya dan harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang telah ditentukan. Setiap unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes Karyamukti memiliki prosedur masing-masing. Dengan adanya prosedur tersebut pengurus BUMDes harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang telah ditetapkan. Tapi pada kenyataannya ada beberapa masyarakat bahkan pengurus tidak mematuhi prosedur yang ada. Ketidak patuhan akan prosedur tersebut terlihat dari beberapa anggota yang tidak diberikan surat perjanjian piutang karena unsur pertemanan maupun kekeluargaan.

Ketidak patuhan tersebut menyebabkan kendala teruhadap penagihan piutang kepada anggota yang disebabkan oleh cacatnya administrasi yang dilakukan oleh BUMDes Karyamukti, sehingga modal yang ada tertahan pada anggota tersebut dan berpengaruh pada laba pada BUMDes Karyamukti.

c. Membuat program/Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa

BUMDes yang baik harus bisa di rasakan oleh masyarakat tentunya, program-program tersebut harus lah sesuai dengan keadaan masyarakat, harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya serta sesuai dengan potensi yang ada di desa sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan berjalan sia-sia.

BUMDes Karyamukti dalam membuat program belum sepenuhnya memperhatikan keadaan masyarakat, keadaan lingkungan sekitarnya serta potensi yang ada didesa. Yang menyebabkan BUMDes Karyamukti baru memiliki beberapa unit usaha. Setiap unit-unit usaha tersebut cukup memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Karyamukti pada khususnya, namun masih belum mampu menjawab permasalahan ekonomi yang ada di Desa Karyamukti.

Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes telah mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat meskipun belum banyak yang dipekerjakan, disamping itu keberadaan unit usaha yang ada juga mempermudah masyarakat dalam membeli keperluan petani tidak perlu jauh-jauh lagi serta mengupayakan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan mesin pemipil jagung guna mempermudah petani dalam mengolah hasil pertaniannya. Namun untuk menanmpung hasil panen belum mampu dilakukan oleh pihak BUMDes Karyamukti, padahal pada tahap inilah peran BUMDes harus ada karena selama ini petani menjual hasil panennya kepada tengkulak yang menyebabkan kerugian bagi petani itu karena harga jual yang diterima lebih rendah.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, ala-talat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

a. Penempatan tugas dan fungsi dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 10 Dijelaskan Bahwa Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes Karyamukti terdiri dari:

1) Penasihat dalam hal ini Kepala Desa Karyamukti
2) Tiga orang pengawas
3) Direktur
4) Sekretaris
5) Bendahara
6) Ketua Unit Sarana Produksi Pertanian
7) Ketua Unit Pemipil Jagu

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karyamukti sudah ada, dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes yang ada di Sekretariat BUMDes Karyamukti.

Kelengkapan susunan pengurusan BUMDes Karyamukti belum mampu mengimbangi kinerja pengurus karena masih banyak kendala di saat menjalankan tugas, diantaranya doubel job antar pengurus yang mengakibatkan terbengkalainya tugas yang lain, ditambah lagi dengan adanya

pekerjaan tetap maupun pekerjaa sampingan di luar sehingga tugasnya sebagai pengurus belum maksimal dilaksanakan.

b. Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas Yang Telah Yang Diamanahkan.

Dalam peraturan desa nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan BUMDdes pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Kewajiban pengurus organisasi BUMDes adalah mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

Dalam hal tanggung jawab Pengurus BUMDes Karyamukti sudah bertanggungjawab terhadap tugasnya. Hal ini tercerrmin dari kedua jenis laporan berikut ini :

1) Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUMDes secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada Kepala Desa
2) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Kepala Desa.

3. Pengarahan di Badan Usaha Milik Desa Karyamukti

Pengarahan yang ada di Badan Usaha Milik Desa ini berhubungan dengan usaha adalah memberikan bimbingan, saran, kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

a. Bimbingan yang bersifat membangun dalam suatu kegiatan.

BUMDes Karyamukti selalu memberi bimbingan atau motivasi untuk giat bekerja dan harus bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. BUMDes Karyamukti selalu berdiskusi dan sharing didalam melaksanakan tugas mereka hal ini agar meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan maupun secara administrasi.

Bimbingan yang dilakukan bersifat mandiri maupun terstruktur, bimbingan yang bersifat mandiri dilakukan oleh pengurus itu sendiri dengan mengundang pemateri untuk memberikan pengarahan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban pengurus dalam menjalankan BUMDes, sedangkan pengarahan secara terstruktur dilakukan oleh pihak PEMDes Kab Gorontalo dan pihak Desa Karyamukti baik dalam bentuk pelatihan maupun konsultasi.

b. Saran

Saran merupakan sobuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi yang bersifat membangun, mendidik, secara objektif dan sesuai dengan topik yang dibahas. saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula, saran dari pemerintah desa ke pengurus BUMDes Karyamukti ialah dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bisa bekerja lebih giat lagi agar tujuan yang diinginkan BUMDes bisa tercapai.

4. Pengawasan dalam BUMDes Karyamukti

Pengawasan yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Ada tiga tahap dalam pengawasan yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Indikatorindikator pengawasan adalah sebagai berikut:

Menetapkan Alat Ukur Dari Suatu Kegiatan

Standar ini sebagai ketentuan yang harus berlaku dan harus diikuti, sebab ketentuan dari standar yang ada akan dilakukan penilaian oleh pihak pengawasan dan hasil pengawasan tersebut akan mengetahui tindakan mana yang salah sehingga akan dilakukan perbaikan.

Untuk standar dalam pengawasan BUMDes Karyamukti, dari pihak pengawas dalam melakukan pengawasan baru berdasarkan pada berpanduan pada Peraturan Desa dan peraturan AD/ART BUMDes Karyamukti, yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam BUMDes Karyamukti. Sedangkan dari sisi akuntansi pengawasan yang dilakukan di BUMDes Karyamukti belum berjalan dengan baik, karena pelaporan keuangan berdasarkan akuntansi perusahaan yang memuat berbagai macam istilah akuntansi yang sulit untuk dipahami oleh pengawas.

a. Mengandalkan Penilaian

Penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah di tetapkan oleh BUMDes Karyamukti. Namuan dalam proses pengawasan ini pihak pengawas Dalam melakukan pengawasan belum pernah terjadi penyimpangan yang fatal didalam organisasi BUMDes Karyamukti, dimana penyimpangan yang terjadi hanya bersifat administratif.

b. Mengadakan Tindakan Perbaikan Dalam Suatu Kegiatan

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan maka di perlukan tindakan perbaikan yang dilakukan dengan cara tindakan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes untuk mengetahui bahwa pelaksanaan atau hasil program tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dapat diketahui.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo maka diperolehlah kesimpulan sesuai indikator manajemen pengelolaan:

1. Pada tahapan perencanaan pengurus BUMDes Karyamukti belum mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan, selain itu program usaha yang dibentuk masih kurang mampu menopang perekonomian karena

belum mampu menampung hasil panen masyarakat.

2. Pengorganisasian yang dibentuk belum mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan tidak terikat oleh pekerjaan lain sehingga pengurus tidak efektif dalam menjalankan tugas.
3. Pada tahap penggerakan BUMDes Karyamukti telah berjalan dengan baik karena adanya pelatihan secara mandiri maupun secara terstruktur dari pihak PEMDes Kab. Gorontalo.
4. Pada tahap pengawasan masih kurang maksimal karena baru berdasarkan AD/ADRT sedangkan secara sistematika akuntansi usaha pihak pengawas masih belum mampu untuk melakukannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1) Diharapkan kepada pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini agar mampu membuat program-program usaha lainnya dengan memaksimalkan potensi desa yang tersedia saat sekarang ini.
2) Diharapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih meningkatkan kesadaran berorganisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menunjang kesuksesan BUMDes.
3) Agar pengurus BUMDes lebih mendorong atau menggerakkan anggota yang lainnya agar mau bekerja lebih giat agar bisa untuk mencapai tujuan secara efektif.
4) Pada pengawasan diharapkan agar pengurus harus lebih untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6. Jakarta. Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung. Alfabeta.

Rismawati. 2018. Peranan Badan Usaha Milik DESA (BUMDes) Perwitasari Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Satika Rani. 2018. Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Bumi Aksara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah